



**STUDI BIAYA OPPORTUNITAS PETANI
PADA HUTAN KEMIRI RAKYAT DI DESA BARUGAE
KECAMATAN MALLAWA KABUPATEN MAROS
PROPINSI SULAWESI SELATAN**

OLEH

**MURDIAWATI
M 111 02 025**



PERPUSTAKAAN PUSAT UNIVERSITAS HASANUDDIN	
Tgl. Terima	31 Juli 08
Asal Dari	Pak. Kehut. Baran
Banyaknya	1 eksemplar
Harga	Hadiah
No. Inventaris	111

Skr - KH 08
MUR
S.

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN HUTAN
FAKULTAS KEHUTANAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2008**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : **Studi Biaya Opportunitas Petani pada Hutan
Kemiri Rakyat di Desa Barugae kecamatan Mallawa
Kabupaten Maros Propinsi Sulawesi Selatan**

Nama : **Murdiawati**

NIM : **M 111 02 025**

Program Studi : **Manajemen Hutan**

Skripsi ini Disusun sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Kehutanan

pada

Program Studi Manajemen Hutan
Fakultas Kehutanan
Universitas Hasanuddin

**Menyetujui
Komisi Pembimbing,**

Pembimbing I



Dr. Ir. H. Syamsu Alam, MS

Pembimbing II



Dr. Ir. H. Mas'ud Junus, M.Sc

Mengetahui,

**Ketua Program Studi Manajemen Hutan
Fakultas Kehutanan
Universitas Hasanuddin**



**Ir. Budirman Bachtiar, MS
Nip. 131 570 887**

Tanggal Lulus : 8 Juli 2008

ABSTRAK

Murdiawati (M 111 02 025). Studi Biaya Opportunitas pada Hutan Kemiri Rakyat di Desa Barugae Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros Sulawesi Selatan di Bawah Bimbingan Syamsu Alam dan Mas'ud Junus.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui biaya oportunitas petani pada hutan kemiri rakyat di Desa Barugae, Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros, Propinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini di harapkan dapat berguna sebagai bahan informasi dan dasar pertimbangan dalam pengelolaan hutan kemiri rakyat yang lestari.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Barugae Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan dari bulan juli hingga Agustus 2007. pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara terhadap 30 responden.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai sewa lahan hutan kemiri rakyat sebesar Rp. 2.571.333 pertahun dan kebun coklat sebesar Rp. 3.639.425 pertahun. Dengan Demikian besarnya nilai oportunitas petani sebesar Rp. 1.068.092 pertahun.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat ALLAH SWT karena berkat rahmat dan anugerah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini berjudul "Studi Biaya Opportunitas pada Hutan Kemiri Rakyat di Desa Barugae Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros Sulawesi Selatan". Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Jurusan Manajemen Hutan Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin.

Atas selesainya penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. **Dr. Ir. H. Syamsu Alam, MS** selaku pembimbing pertama dan kepada **Dr. Ir. H. Mas'ud Junus, M.Sc** selaku pembimbing kedua yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk dalam pelaksanaan penelitian sampai penyusunan skripsi ini.
2. **Ir. H. A. Mujetahid, MP, Ir. M. Asar Said Mahbub, MP** dan **Dr. Ir. Yusran Jusuf, M.Si** yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk dalam penyusunan skripsi ini.
3. **Dr. Ir. H. Muh. Restu, MP** selaku Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin.

4. **Prof. Dr. Ir. Musrizal Muin, M.Sc** Selaku Pembantu Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin.
5. **Ir. Budirman Bachtiar, MS** Selaku Ketua Program Studi Manajemen Hutan Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin.
6. **Ir. Abd. Rasyid Kalu, MS** selaku Penasehat Akademik penulis.
7. Seluruh Dosen Pengajar dan Staf Pegawai administrasi Fakultas Kehutanan.
8. Ayahanda **Mustajab** dan Ibunda **Rusmina** atas cinta dan kasih sayang tak terhingga yang telah diberikan kepada penulis.
9. Saudara- saudaraku (**Mus, Temmi, Ame, Ondang, Masse, Tato dan Nandar**) atas dukungan dan semangat yang diberikan kepada penulis.
10. Rekan-Rekan diskusi Penelitian **Wiwien, Rhos, Leo dan K' One**
11. Seluruh rekan-rekan mahasiswa kehutanan ANGKATAN "02" terkhusus buat sahabat-sahabatku "**Fitri, Utti, Wiwien Ros, Ica, Dwi, Diana, Rika, Emma, Helmi, Leo, Iwan, Ode, Misra, Verdi, Angga, Eky, Zul, Lubis dan Mirta**"
12. Buat **K' Tini, Fate, vera, Inci** terimakasih atas kebersamaannya.
13. Untuk **Jum, Jasi, Bunga, Ayah Oda, Mama Oda, Halijah, Ecce, Saria, Diana** dan seluruh keluargaku yang tidak dapat yang sebutkan satu persatu.
14. Rekan-rekan angkatan 2002 serta rekan-rekan **Sylva** yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Dalam skripsi ini akan ditemukan begitu banyak kekurangan disebabkan karena keterbatasan penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini sehingga dapat berguna juga untuk penulisan skripsi selanjutnya.

Wallahu mustaam billahi taufik walhidayah

Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, Juli 2008

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan dan Kegunaan	3
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Hutan Rakyat	4
B. Manfaat Hutan Rakyat	5
C. Potensi Hutan Rakyat	6
D. Kebijakan Pengelolaan Hutan Rakyat	7
E. Biaya Opportunitas Hutan Rakyat	8
III. METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Tempat	9
B. Teknik Pengumpulan Data	9

C. Analisis Data	10
D. Konsep Operasional	12
IV. KEADAAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Keadaan Fisik Lokasi	14
1. Letak dan Luas	14
2. Keadaan Tanah	14
3. Topografi	15
4. Keadaan Iklim	15
5. Peruntukan Lahan	17
B. Keadaan Sosial, Ekonomi dan Budaya	18
1. Penduduk	18
2. Mata Pencaharian	19
3. Kelembagaan masyarakat	20
4. Potensi Sumberdaya manusia	21
5. sarana dan Prasarana	22
V. HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Identitas Responden	25
1. Umur Petani Responden	25
2. Tingkat Pendidikan	26
3. Jumlah Tanggungan Keluarga	27
4. Jumlah Tenaga Kerja	28
5. Luas Lahan Hutan Kemiri Rakyat	30
6. Status Lahan dan Luas Lahan Garapan	30
7. Biaya Penggunaan Sarana Produksi	31
8. Produksi dan Produktivitas	32
B. Pendapatan Bersih Petani HKR dan yang Terkonversi	33
C. Sewa Lahan HKR dan yang Terkonversi	34
D. Biaya Opportunitas Petani pada HKR	35

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	37
B. Saran	37

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**

DAFTAR TABEL

Nomor	Teks	Halaman
1.	Data Curah Hujan Rata-rata Bulanan Selama Sepuluh Tahun Terakhir di Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros (1996-2005).....	15
2.	Jumlah Bulan Basah, Bulan Kering dan Bulan Lembab Selama Sepuluh Tahun Terakhir di Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros (1996 – 2005).....	16
3.	Klasifikasi Iklim di Indonesia Menurut Schmidt dan Fergusson.....	17
4.	Peruntukkan Lahan Desa Barugae Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros.....	18
5.	Jumlah Penduduk Desa Barugae Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros Menurut Golongan Umur dan Jenis Kelamin.....	19
6.	Keadaan Mata Pencaharian Penduduk Desa Barugae Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros.....	20
7.	Jumlah dan Persentase Responden Menurut Tingkat Umur di Desa Barugae Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros.....	25
8.	Jumlah dan Persentase Menurut Tingkat Pendidikan Petani Hutan Kemiri Rakyat di Desa Barugae Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros.....	26
9.	Jumlah dan Persentase Tanggungan Keluarga Petani di Desa Barugae Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros.....	28
10.	Klasifikasi Jumlah Tenaga Kerja Pada Pola Penggunaan Lahan Hutan Kemiri Rakyat di Desa Barugae Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros.....	29
11.	Luas Lahan pada Hutan Kemiri Rakyat yang Dimiliki Petani Responden di Desa Barugae Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros.....	30
12.	Klasifikasi Responden Berdasarkan Tingkat Kepemilikan Lahan di desa Barugae Kecamatan mallawa Kabupaten Maros.....	31



- | | |
|---|---------------|
| 13. Biaya Penggunaan Sarana Produksi yang Digunakan Petani Dalam Mengelolah Hutan Kemiri Rakyat di Desa Barugae Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros..... | 33 |
| 14. Jumlah Rata-rata Luas lahan, Produksi, Produktivitas dan Nilai Produksi dari Pola Penggunaan Lahan di Desa barugae Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros..... | 33 |
| 15. Rata-rata Pendapatan Petani dari Berbagai Pola Penggunaan Lahan Dalam Setahun di Desa Barugae Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros..... | 34 |
| 16. Rata-Rata Nilai Sewa Lahan Petani dari Pola Penggunaan Lahan HKR dan yang Terkonversi di Desa Barugae Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros..... | 34 |

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Teks	Halaman
1.	Data Mentah Hasil Wawancara	40
2.	Pendapatan dari Pola Penggunaan Lahan Kemiri di Desa Barugae Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros	43
3.	Pendapatan dari Pola Penggunaan Lahan Kebun di Desa Barugae Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros	45

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hutan merupakan sumberdaya alam yang sangat dibutuhkan oleh manusia, karena hutan berfungsi sebagai pengatur tata air, penghasil kayu, tempat rekreasi serta meningkatkan pendapatan negara dan devisa, memacu pembangunan daerah.

Perkembangan jumlah penduduk yang semakin meningkat dari waktu ke waktu mendorong meningkatnya kebutuhan masyarakat akan hasil hutan, baik berupa kayu maupun non kayu termasuk jasa lingkungan. Kebutuhan kayu yang semakin meningkat sementara areal hutan alam yang semakin berkurang, sehingga diperlukan pengelolaan hutan yang tepat dalam memenuhi kebutuhan kayu. Pada tahun 1999 kebutuhan kayu untuk industri mencapai 97,7 juta m³/tahun sementara kemampuan hutan alam hanya mampu menyediakan kayu 45,8 juta m³/tahun. Akibatnya terjadi kekurangan pasokan kayu sebesar 51,9 juta m³/tahun, yang menyebabkan tekanan terhadap hutan alam semakin besar (Kartodiharjo, 1999). Kekurangan pasokan kayu dari hutan alam tersebut mendorong terjadinya peningkatan permintaan kayu dari hutan rakyat.

Sulawesi Selatan adalah merupakan satu propinsi di luar Jawa yang memiliki potensi hasil pertanian, perkebunan, dan kehutanan yang cukup besar, sehingga diperlukan adanya pengelolaan sumberdaya alam secara bijaksana. Salah satu potensi sumberdaya alam yang dikelola dan dikembangkan masyarakat adalah hutan/kebun

kemiri rakyat. Salah satu jenis hutan kemiri rakyat adalah di Kabupaten Maros yang cukup potensial untuk menunjang kehidupan sehari-hari masyarakat maupun sebagai komoditi perdagangan.

Luas hutan rakyat di Kabupaten Maros adalah 9.299 ha yang tumbuh dan tersebar di Kecamatan Mallawa seluas 4.956 ha dengan rata-rata luas pemilikan petani 1.87 ha (62.54 % dari total lahan yang dikuasai). Hutan rakyat tersebut tersebar di dalam kawasan hutan yaitu 7.001 ha dan di luar kawasan hutan yaitu seluas 2.298 ha (Dinas Kehutanan Kab Maros, 2002, Dinas Kehutanan Propinsi Sulawesi Selatan, 2005 dan Yusran, 2005). Hutan rakyat kabupaten Maros yang didominasi jenis kemiri saat ini banyak dikonversi untuk penggunaan lain (sawah, kebun, ladang, dll) padahal hutan kemiri rakyat tersebut mempunyai fungsi perlindungan yang sangat penting, karena sebagian besar terletak pada bagian hulu DAS Bila-Walanae (Alam, 2007).

Kebijakan pengelolaan hutan kemiri rakyat yang membatasi masyarakat mengelola hutan kemirinya secara intensif di dalam kawasan hutan dan perizinan pemanfaatan kayu berdampak terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat yang bermukim di sekitar hutan kemiri rakyat terutama dalam hal pendapatan, ketersediaan lahan dan harga komoditi hutan kemiri rakyat. Dampak dari kebijakan pengelolaan hutan rakyat tersebut berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap tidak terjaminnya keberlanjutan pengelolaan hutan kemiri rakyat yang pada akhirnya petani melakukan konversi hutan kemiri ke usahatani lainnya. Manfaat langsung berupa kayu, biji kemiri, tumbuhan obat-obatan dan sumber pangan

manusia sedangkan manfaat tidak langsung berupa pengatur tata air, perlindungan kesuburan tanah/erosi dan perlindungan keanekaragaman hayati.

Permasalahan yang dihadapi unit usaha hutan kemiri saat ini adalah rendahnya sewa lahan yang diterima petani sebagai pengelola sari usaha hutan kemiri rakyat, jika dibandingkan alternatif penggunaan lahan untuk komoditi lain. Hal tersebut membebani biaya opportunity petani hutan kemiri rakyat. Sewa lahan hutan yang rendah dan biaya opportunity petani yang tinggi akan mendorong petani mengkonversi hutannya ke penggunaan lahan yang menguntungkan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka studi biaya opportunity petani hutan kemiri rakyat sangat diperlukan dalam pengelolaan hutan rakyat. Selain itu untuk meningkatkan pedapatan serta pertumbuhan pendapatan serta pertumbuhan ekonomi desa secara mandiri dan kokoh.

B. Tujuan dan Kegunaan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui biaya opportunity petani pada hutan kemiri rakyat di Desa Barugae, Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros, Propinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan informasi dan dasar pertimbangan dalam pengelolaan hutan rakyat kemiri yang lestari.



II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Hutan Rakyat

Simon (1995), menyatakan bahwa hutan rakyat adalah hutan yang di bangun oleh masyarakat yang ditujukan untuk menghasilkan kayu atau komoditas berikutnya secara ekonomis. Hutan rakyat dapat di bangun di atas lahan milik tetapi dapat pula di atas lahan hutan negara dengan kontrol pemerintah.

Hutan milik adalah hutan yang tumbuh atau ditanam diatas tanah milik yang lazimnya disebut hutan rakyat dan dapat dimiliki oleh orang baik sendiri maupun bersama-sama orang lain atau badan hukum. Hutan yang ditanam atau usaha sendiri di atas tanah yang dibebani hak lainnya, merupakan pula hutan milik dari orang lain / badan hukum yang bersangkutan (Zain, 1998).

Menurut Tinambun dan Djaban (1995), hutan rakyat di bangun pada lahan milik atau gabungan dari lahan yang ditanami pohon, yang pembinaan dan pengelolaan dilakukan oleh pemiliknya atau suatu badan usaha seperti koperasi dengan berpedoman pada ketentuan – ketentuan yang telah digariskan oleh pemerintah. Tujuan dibangun hutan rakyat dalam usaha meningkatkan pendapatan masyarakat, memenuhi kebutuhan kayu atau memelihara kestabilan lingkungan.

Keterlibatan pemerintah dalam pengembangan hutan rakyat dimulai dengan adanya Inpres Penghijauan pada tahun 1976 pada lahan – lahan yang kritis, selain itu program pembinaan hutan rakyat mendapat perhatian yang besar dari pemerintah (Supriadi, 2002). Selanjutnya disebutkan bahwa produk utama hutan rakyat adalah

hasil berupa kayu – kayuan baik kayu pertukangan, kayu industri, kayu serat dan kayu energi, sedangkan hasil sampingan hutan rakyat dapat diperoleh sebelum hasil utama kayu. Hasil sampingan tersebut berupa getah, buah, kulit dan sebagainya.

B. Manfaat Hutan Rakyat

Manfaat hutan rakyat menurut Simon (1998), adalah sebagai sarana dan peningkatan pendapatan masyarakat, memperluas kesempatan kerja, memantapkan ketahanan ekonomi dan keamanan desa, menambah suplai bagi industri kehutanan, meningkatkan kualitas lingkungan serta meningkatkan daya dukung bagi keberadaan satwa dan berbagai jenis kebutuhan.

Hutan memberikan manfaat termasuk hutan yang dikelola rakyat dapat memberikan manfaat (Wirakusumah, 2003 dan Wollenberg, 2003) antara lain :

a. Menambah penghasil penduduk, hutan rakyat cukup berperan dalam peningkatan pendapatan masyarakat. Misalnya hutan rakyat di Kabupaten Maros memberikan kontribusi pendapatan dari buah dan kayu kemiri yang diusahakan masyarakat.

b. Sumber kayu bakar

Kebutuhan kayu bakar masyarakat minimal untuk sehari- hari sebagian besar dapat terpenuhi dari hutan tersebut.

c. Sumber kayu pertukangan dari kayu perkakas

Berhasilnya dibangun hutan rakyat dengan jenis – jenis yang terpilih , tidak menutup kemungkinan untuk dapat menghasilkan kayu pertukangan.

d. Berfungsi hidro - orologis

Mengingat letak tanah rakyat beragam mulai dari daratan rendah sampai daerah pengunungan dengan lereng yang curam maka peletakan hutan rakyat di tempat yang disebut terakhir ini akan berperan terhadap pengawetan tanah dan air.

e. Mengurangi terjadinya kerusakan hutan akibat penebangan liar dan penyerobotan lahan.

C. Potensi Hutan Rakyat

Hutan rakyat di Indonesia mempunyai potensi besar yang mampu menyediakan bahan baku kehutanan. Diperkirakan potensi kayu rakyat tersebut mencapai 38.416.557 m³ dengan luas 1.560.229 ha (Alam, 2007).

Potensi hutan kemiri rakyat menurut Ginoga, dkk (1992), dalam Yusran (2005), produksi kemiri dari Sulawesi Selatan pada tahun 1989 adalah 11.742 ton dengan luas areal 31.331 ha atau 44 % dari total produksi seluruh Indonesia yang berjumlah 26.767 ton dengan luas areal tanaman 84.500 ha. Sedangkan data statistik Dinas Perkebunan Sulawesi Selatan (1997) adalah luas 44.660 ha dengan jumlah produk 24.266 ton. Potensi hutan kemiri rakyat terdapat di Kabupaten Maros dengan luas 9.350 ha dengan produksi kemiri 5.605 ton dengan jumlah petani 9.404 kk.

Melihat potensi dan peranan yang cukup penting tersebut, maka akhir-akhir ini berbagai upaya mengembangkan hutan rakyat terus digalakkan, namun demikian sampai saat ini perkembangannya masih lambat. Hal ini disebabkan antara lain karena terbatasnya pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat dalam penerapan

teknologi dan kurangnya perhatian dari pengambilan keputusan dibidang kehutanan, terutama pembinaannya menyebabkan produktivitasnya yang rendah.

D. Kebijakan Pengelolaan Hutan Rakyat

Menurut Simon (1999), dalam pengelolaan hutan rakyat tidak hanya terbatas pada lahan milik, tetapi dapat juga dilakukan pada kawasan hutan produksi, kawasan hutan konservasi dan kawasan hutan lindung. Untuk lahan milik dan kawasan hutan produksi diarahkan untuk produksi kayu sebagai produk utama, sedangkan pada hutan lindung dan konservasi diarahkan untuk produksi non kayu dan jasa lingkungan.

Kuchli (2004), mengemukakan bahwa kunci keberhasilan Swiss dalam merehabilitasi hutan yang rusak adalah memberikan peluang kepada masyarakat melakukan pengelolaan hutan pada lahan hutan dan memperkuat institusi lokal / desa.

Prinsip umum pertanahan dan prinsip khusus kehutanan dalam usaha pengelolaan hutan rakyat, merupakan norma hukum perundang – undangan yang wajib dilaksanakan secara selaras dan terpadu. Kedua bentuk prinsip yang diwujudkan bagi pengelolaan hutan rakyat, terkandung hubungan hak dan kewajiban dalam kedudukannya sebagai subjek hukum pengelolaan (Zain, 1998).

E. Biaya Opportunitas Hutan Rakyat

Menurut Suparmoko (1989), air merupakan produk penting dari hutan. Tanah di hutan merupakan busa raksasa yang mampu menahan air hujan sehingga meresap perlahan – lahan ke dalam tanah. Banyak daerah yang menggantungkan diri terhadap persediaan air dari hutan dengan sungai – sungai yang mengalir sepanjang tahun. Tetapi bila pohon – pohon hutan ditebang, maka tanah langsung terbuka sehingga bila turun hujan akan langsung mengalir ke sungai dan menyebabkan banjir dan erosi.

Manfaat tangible dari hutan rakyat, yakni manfaat berupa kayu dapat secara langsung dinilai oleh sistem pasar. Sedangkan manfaat intangible antara lain mencakup manfaat perlindungan dan pengaturan tata air, kesuburan tanah dan pencegah erosi sampai saat ini tidak dapat atau masih sulit dinilai oleh sistem pasar (Darusman, 2002).

Perhitungan biaya oportunitas (pendapatan yang hilang) karena melestarikan hutan rakyat, dilakukan dengan pendekatan harga pasar. Perhitungan ini untuk mengetahui berapa biaya yang harus dikeluarkan agar manfaat jasa lingkungan dari hutan rakyat tetap lestari, perhitungan tersebut bukan untuk memberikan nilai total manfaat hutan rakyat (Suparmoko, 2000).

III. METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilaksanakan selama bulan Juli – Agustus 2007 di Desa Barugae Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros Propinsi Sulawesi Selatan.

B. Teknik Pengumpulan Data

Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder yaitu :

1. Data primer adalah data yang diperoleh di lapangan, dengan metode pengumpulan data melalui :
 - a. Wawancara; digunakan untuk memperoleh data dan informasi yang akurat. Metode wawancara yang dilakukan terdiri atas wawancara terstruktur dengan menggunakan kuesioner dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara dilakukan terhadap petani hutan kemiri rakyat dan masyarakat yang kena dampak dari hutan kemiri rakyat tersebut.
 - b. Observasi lapangan dilakukan melalui pencatatan, pengukuran dan pengamatan terhadap studi yang diperkirakan memengaruhi hasil penelitian. Observasi dilakukan guna memperoleh data tentang biaya oportunitas petani hutan kemiri rakyat.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi pustaka hasil-hasil penelitian sebelumnya, instansi atau lembaga yang terkait dengan penelitian.

C. Analisis Data

Untuk mengetahui biaya opportunity petani pada hutan kemiri rakyat digunakan analisis sebagai berikut :

1. Analisis Usahatani

Analisis usahatani digunakan untuk mengetahui pendapatan petani dari usaha hutan kemiri rakyat dan pendapatan petani dari usahatani konversi hutan kemiri.

Adapun rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$Pd = TR - TC$$

Dimana :

Pd = Pendapatan Usahatani

TR = Total Penerimaan

TC = Total Biaya

$$TR = Y \times Py$$

Dimana :

TR = Total Penerimaan

Y = Produksi

Py = Harga Produksi Y

$$TC = \sum_{i=1}^n Xi.Pxi$$



Dimana :

TC = Total Biaya

X_i = Macam input

PX_i = Harga Input

n = Banyaknya Macam Input

2. Analisis Sewa Lahan

Analisis sewa lahan dilakukan untuk mengetahui nilai pendapatan dari faktor produksi lahan dengan pola usahatani kemiri. Adapun rumus yang digunakan adalah (Darusman, 1992) :

$$LR = TR - TC (1 + a \%)$$

Dimana :

LR = Nilai Sewa Lahan

TR = Total Penerimaan

TC = Total Biaya

$a \%$ = Keuntungan Normal (20 %).

3. Analisis Biaya Opportunitas Petani Hutan Kemiri

Untuk mengetahui nilai manfaat yang tidak diterima petani karena tetap mempertahankan lahannya sebagai hutan kemiri rakyat. Besarnya nilai biaya oportunitas dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$OC = LR_{NON HR} - LR_{HR}$$

Dimana :

OC = Biaya Opportunitas petani hutan kemiri rakyat

LR_{NONHR} = Nilai sewa lahan usahatani konversi

LR_{HR} = Nilai sewa lahan hutan kemiri rakyat

D. Konsep Operasional

Konsep operasional adalah batasan operasional dari berbagai istilah yang berhubungan dengan penelitian dan untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman mengenai pengertian dari istilah-istilah tersebut, maka berikut ini batasan pengertian dari beberapa istilah :

1. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan yang lain tidak dapat dipisahkan.
2. Hutan Rakyat adalah hutan yang berada diatas tanah yang dibebani hak atas tanah.
3. Hutan Kemiri Rakyat adalah areal hutan kemiri yang dikelola oleh masyarakat untuk memperoleh berbagai manfaat ekonomis, ekologi (lingkungan) dan sosial baik di dalam kawasan maupun di luar kawasan hutan.
4. Biaya opportunitas petani hutan kemiri rakyat adalah kerugian yang ditanggung oleh petani karena tidak mengkonversi hutan kemirinya kepada alternatif penggunaan lain yang lebih menguntungkan.

5. Sewa Lahan adalah total penerimaan dikurangi total biaya dan keuntungan normal dari usahatani hutan kemiri rakyat.
6. Kebijakan Pengelolaan Hutan Rakyat adalah kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk melestarikan hutan dan meningkatkan pendapatan masyarakat dan penerimaan Negara dari hasil hutan rakyat.
7. Keuntungan normal adalah penanggulangan resiko dari kegiatan produksi yang besarnya 20% dari total biaya produksi.
8. Total penerimaan adalah hasil kali jumlah produksi dengan harga satuan produksi yang dihasilkan selama satu tahun.
9. Total biaya adalah biaya yang besar kecilnya dipengaruhi oleh proses produksi / jasa yang diukur dalam satuan rupiah pertahun.
10. Produktivitas adalah perbandingan antara jumlah produksi dengan luas lahan yang diusahakan.
11. Produksi adalah hasil yang diperoleh dari pola penggunaan lahan yang diusahakan.

IV. KEADAAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Keadaan Fisik Lokasi

1. Letak dan Luas

Desa Barugae berada dalam wilayah administrasi pemerintahan Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros yang memiliki luas wilayah 1.810,94 ha atau 18,1094 km². Desa Barugae terbagi ke dalam tiga dusun yaitu Dusun Mamappang, Dusun Balanglohe dan Dusun Takkehatu, dengan batas wilayah desa sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Dusun Tellumpanuae
2. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bentengge
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Padaelo dan Kelurahan Sabila
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tellumpanuae

2. Keadaan Tanah

Berdasarkan peta tinjauan tanah Sulawesi Selatan, tanah di Desa Barugae Kecamatan Mallawa terdiri dari 2 jenis tanah, pertama jenis Grumosol yaitu tanah dengan kadar liat lebih dari 30% bersifat mengembang, mengerut kalau musim kering dan kalau basah lengket mengembang. Jenis kedua yaitu tanah dengan horizon penimbunan liat atau horizon argilik hanya saja biasanya lebih dari 35 %.

3. Topografi

Konfigurasi lapangan Desa Barugae secara makro merupakan daerah dengan pegunungan yang berombak, bergelombang, berbukit dan bergunung-gunung. Topografi bervariasi dari datar sampai bergunung-gunung. Khususnya untuk Desa Barugae berada pada ketinggian 325 – 1.200 meter dari permukaan laut, dengan kondisi kelerengan 0 – 45 %.

4. Keadaan Iklim

Iklim sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan, perkembangan serta produksi tanaman. Salah satu faktor iklim yang sangat berperan terhadap pertumbuhan tanaman adalah curah hujan. Data curah hujan selama sepuluh tahun terakhir di Kecamatan Mallawa dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini :

Tabel 1. Data Curah Hujan Rata-Rata Bulanan Selama Sepuluh Tahun Terakhir di Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros (1996 – 2005)

Bulan	Tahun										Rata-rata
	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	
Januari	747	37	310	462	276	96	396	839	0	71	323,6
Februari	126	109	155	395	203	323	205	384	0	348	224,8
Maret	110	182	130	232	124	9	251	235	0	393	174,7
April	140	141	167	179	176	25	69	287	0	155	133,9
Mel	100	25	34	167	184	28	226	51	0	18	83,3
Juni	219	63	28	87	154	39	4	41	-	17	65,2
Juli	205	82	42	54	45	16	-	-	2	-	46,2
Agustus	113	-	15	34	34	-	-	14	-	-	21,4
September	41	-	-	13	9	1	1	66	-	-	13,1
Oktober	19	-	-	253	32	38	-	99	-	-	44,1
November	176	41	-	256	189	190	319	193	89	175	162,8
Desember	773	20	-	431	292	52	-	137	780	283	400,1
Total	2769	700	881	2563	1718	898	1473	3579	871	1460	1409,33

Sumber : Stasiun Klimatologi Kelas I Maros, 2006.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Stasiun Klimatologi dan Geofisika Kelas 1 Maros periode 1996 – 2005 dapat ditentukan jumlah bulan basah, bulan lembab dan bulan kering dengan menggunakan tiga parameter yaitu:

- Bulan Basah (BB), jika curah hujan setiap bulannya > 100 mm.
- Bulan Lembab (BL), jika curah hujan setiap bulannya antara 60 mm – 100 mm.
- Bulan Kering (BK), jika curah hujan setiap bulannya < 60 mm.

Nilai rata-rata bulan basah, bulan kering dan bulan lembab selama sepuluh tahun terakhir di Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros dapat dilihat pada Tabel 2,

Tabel 2. Jumlah Bulan Basah, Bulan Kering dan Bulan Lembab Selama Sepuluh Tahun Terakhir di Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros (1996 – 2005)

Tahun	Jumlah Bulan Basah	Jumlah Bulan Kering	Jumlah Bulan Lembab
1996	9	2	1
1997	3	4	2
1998	4	4	-
1999	8	3	1
2000	8	4	-
2001	2	7	2
2002	5	2	1
2003	6	3	2
2004	1	1	6
2005	5	2	1
Jumlah	51	32	16
Rata ²	5,1	3,2	1,6

Sumber: Data Stasiun Klimatologi I Maros, 2006.

Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 10 tahun terakhir ditemukan bulan basah sebanyak 51 dengan rata-rata 5,1, bulan kering sebanyak 32 dengan rata-rata 3,2 dan bulan lembab sebanyak 16 dengan rata-rata 1,6. sehingga data tersebut dapat ditentukan nilai Q Ratio sebagai berikut :



$$\begin{aligned}
 \text{Q Ratio} &= \frac{\text{Rata-rata Bulan Kering}}{\text{Rata-rata Bulan Basah}} \times 100\% \\
 &= \frac{3,2}{5,1} \times 100\% \\
 &= 62,75\%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan klasifikasi tipe iklim Schmidt dan Furguson seperti diperlihatkan pada Tabel 3, diketahui bahwa lokasi penelitian termasuk iklim D dengan nilai Q ratio berkisar antara 60 - 100%

Tabel 3. Klasifikasi Iklim di Indonesia Menurut Schmidt dan Furguson.

Tipe Iklim	Nilai Q Ratio (%)	Kondisi Iklim
A	0 – 14,3	Sangat Basah
B	14,3 – 33,3	Basah
C	33,3 – 60	Agak Basah
D	60 – 100	Sedang
E	100 – 160	Agak Kering
F	160 – 300	Kering
G	300 – 700	Sangat Kering
H	> 700	Luar Biasa Kering

5. Peruntukan Lahan

Penggunaan lahan di Desa Barugae Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros umumnya berupa hutan rakyat yaitu seluas 681,00 ha, sawah baik yang dialiri dengan pengairan non teknis maupun tadah hujan, masing-masing 137,00 ha, perkebunan rakyat 368,00 ha. Adapun perincian dan penggunaan lahan dapat dilihat pada Tabel 4 sebagai berikut :

Tabel 4. Peruntukan Lahan Desa Barugae Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros.

No.	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (ha)	Persen (%)
1.	Sawah	137,00	7,57
2.	Ladang, Kolam/tambak, Kebun	497,17	27,45
3.	Perkebunan Rakyat	368,00	20,32
4.	Hutan Rakyat/Kemiri	681,00	37,60
5.	Perumahan/Pemukiman	20,08	1,11
6.	Industri/Kantor/Pertokoan	1,60	0,09
7.	Lain-lain	106,09	5,86
	Jumlah	1810,94	100

Sumber : Kantor Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros, 2006.

Pada Tabel 4 di atas menunjukkan bahwa sekitar 37,60 % penggunaan lahan di Desa barugae didominasi oleh Hutan Kemiri Rakyat dan sekitar 5,86 tidak jelas penggunaannya. Jika dikaitkan pada sektor mata pencaharian masyarakat pada umumnya bekerja pada sektor pertanian maka luas lahan yang digunakan sebesar 1683,17 ha (92,94 %) yang diperuntukkan pada areal sawah, ladang, kolam/tambak, kebun, perkebunan rakyat dan hutan rakyat/kemiri.

B. Keadaan Sosial, Ekonomi dan Budaya

1. Penduduk

Jumlah penduduk Barugae sebanyak 1.101 jiwa yang terdiri dari 529 jiwa laki-laki dan 572 jiwa perempuan yang tersebar ditiga dusun. Dusun Barugae terdapat 113 jiwa usia balita (0-4 tahun), 382 jiwa usia sekolah (5-19 tahun), 567 jiwa usia produktif (20-64 tahun), dan 39 jiwa usia yang tidak produktif lagi. Hal ini menggambarkan bahwa ternyata masih terdapat cukup banyak usia kerja yang merupakan salah satu faktor pendukung untuk pengembangan usahatani dalam upaya

peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk lebih jelasnya data jumlah penduduk Desa Barugae dapat di lihat pada Tabel 5 berikut:

Tabel 5. Jumlah Penduduk Desa Barugae Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros Menurut Golongan Umur dan Jenis Kelamin.

Golongan Umur (tahun)	Laki-laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)	Jumlah (jiwa)
0 – 4	62	51	113
5 – 9	63	60	123
10 – 14	63	50	113
15 – 19	49	97	146
20 – 24	39	49	88
25 – 29	40	78	118
30 – 34	46	40	86
35 – 39	37	30	67
40 – 44	32	26	58
45 – 49	28	23	51
50 – 54	20	18	38
55 – 59	13	12	25
60 – 64	15	21	36
>65	22	17	39
Jumlah	529	572	1101

Sumber : Kantor Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros, 2006

2. Mata Pencaharian

Masyarakat Desa Barugae Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros sebagian besar merupakan masyarakat agraris, meskipun demikian memiliki keragaman mata pencaharian. Untuk lebih jelasnya, data mata pencaharian penduduk Desa Barugae dapat di lihat pada Tabel 6 berikut :

Tabel 6. Keadaan Mata Pencaharian Penduduk Desa Barugae Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros.

No.	Pekerjaan/Usaha	Jumlah (jiwa)	Persen (%)
1.	Pertanian	158	65,3
2.	Industri	2	0,8
3.	Perdagangan	9	3,7
4.	Angkutan	6	2,5
5.	Jasa	67	27,7
	Jumlah	242	100

Sumber : Kantor Desa Barugae, Kecamatan Mallawa, 2005.

Pada Tabel 6 dapat dilihat bahwa Desa Barugae Kecamatan Mallawa 63,3 % penduduknya bekerja pada sektor pertanian dan hanya sebagian kecil masyarakat (27,7 %) yang bekerja dibidang jasa. Selebihnya bekerja pada sektor perdagangan, angkutan dan industri. Hal ini membuktikan bahwa secara garis besar penduduk Desa Barugae penghasilannya berasal dari sektor pertanian.

3. Kelembagaan Masyarakat

Kelembagaan masyarakat di Desa Barugae terdiri atas lembaga adat dan lembaga kemasyarakatan. Lembaga adat yang memegang peranan paling penting di Desa Barugae adalah *Tudang sipulung* (berkumpul bersama) yang merupakan forum tertinggi. Keputusan yang akan diputuskan pada *tudang sipulung* adalah keputusan yang akan dijalankan oleh masyarakat setempat. Lembaga kemasyarakatan ini merupakan mitra pemerintah desa seperti Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), PKK, Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT), Kelompok Tani dan juga Kelompok Arisan.

Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) berfungsi sebagai mitra dalam mengkoordinasi pembangunan Desa Barugae, sedangkan RT dan RW

berfungsi untuk menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat desa sekaligus membantu tugas pokok LKMD. Kelompok tani di Desa Barugae berfungsi sebagai wadah untuk penyelesaian permasalahan petani Desa Barugae yang merupakan wadah silaturahmi. Kelembagaan di Desa Barugae diatur dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maros yang dikontrol langsung oleh Pemerintah Kecamatan Mallawa.

4. Potensi Sumberdaya Manusia

Masyarakat petani Desa Barugae adalah masyarakat yang memiliki kemampuan mengolah lahan yang cukup baik khususnya pada masyarakat Dusun Mamappang. Hal ini dibuktikan dari kreatifitas $\pm 90\%$ masyarakat petani Desa Barugae dalam mengidentifikasi lahan. Aktifitas petani di Dusun Mamappang pada musim hujan umumnya di sawah dan pada musim kemarau terkonsentrasi pada tanaman cabe.

Kaum perempuan Desa Barugae umumnya terlibat dalam pemanfaatan kawasan hutan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kaum perempuan yang ikut membantu keluarga/suami seperti dalam kegiatan pemungutan hasil hutan dan pengelolaan pasca panen. Pada umumnya kaum laki-laki Desa Barugae menganggap bahwa wilayah kerja perempuan terbatas hanya pada urusan domestik saja, sehingga dalam pengambilan keputusan kaum perempuan jarang dilibatkan. Akan tetapi kaum perempuan turut membantu pada waktu persiapan sampai waktu pemasaran, seperti ikut menabur di sawah, memungut kemiri di hutan (*ma'kampirri*),

menjemur/mengeringkan kemiri, *ma'deppa* (pecah kemiri), *mamileh* (memilih kemiri yang baik) sampai kegiatan penjualan.

Pada umumnya masyarakat Desa Barugae berpendidikan SD sampai SMU, sedangkan hanya sebagian kecil yang melanjutkan ke perguruan tinggi. Hal ini disebabkan karena kewajiban untuk membantu orang tua baik dalam kegiatan pertanian maupun kegiatan rumah tangga.

5. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan keterlibatan kelembagaan baik formal maupun informal dalam usaha pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Desa Barugae meliputi :

1. *Tudang Sipulung*

Lembaga tidak berwujud tetapi merupakan sarana yang paling efektif adalah *tudang sipulung* (berkumpul bersama untuk menetapkan suatu hal), wadah ini merupakan tempat pengambilan keputusan tertinggi. *Tudang sipulungat* dimanfaatkan sebagai lembaga gotong royong desa dan untuk menginstruksikan waktu dimulainya suatu kegiatan penanaman padi. Pemerintahan desa melalui *tudang sipulung* mengumpulkan warga untuk mengadakan kegiatan yang melibatkan warga desa seperti gotong royong, perayaan, dan adat istiadat.

2. Kelompok Tani

Masyarakat Desa Barugae adalah masyarakat yang telah menyadari arti dan manfaat dari hidup berkelompok. Terbukti dengan terbentuknya kelompok-kelompok tani yang dijadikan tempat untuk menyalurkan inspirasi dan memecahkan masalah pertanian. Kelompok tani ini melakukan kegiatan pembibitan merica, kakao, rambutan dan lain-lain yang bertempat di rumah-rumah masyarakat.

3. Sarana Pendidikan, Kesehatan dan Ibadah

Sarana pendidikan yang ada di Desa Barugae masih terbatas. Desa Barugae hanya memiliki dua Sekolah Dasar yaitu di Lempang (Dusun Mamappang) dan Dusun Balanglohe. Untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang terdekat terdapat di Desa Tellumpanuae yang berbatasan dengan Desa Barugae, sedangkan untuk sekolah menengah umum (SMU) hanya terdapat di daerah Camba \pm 8 km dari Desa Barugae.

Sarana kesehatan masyarakat Desa Barugae ditangani oleh seorang bidan desa dan untuk kesehatan anak dilaksanakan di posyandu yang dilaksanakan setiap bulannya. Mayoritas masyarakat Desa Barugae adalah agama Islam, sehingga sarana peribadatan yang ada hanya berupa mesjid yang berjumlah empat buah yaitu dua di Dusun Mamappang, satu di Dusun Balanglohe dan Satu di Dusun Takkehatu.

4. Sarana Transportasi dan Pemasaran

Pemasaran hasil bumi masyarakat petani Desa Barugae melibatkan pedagang pengumpul secara langsung dengan menggunakan sarana angkutan umum untuk dipasarkan di Makassar dan Kabupaten Maros. Harga jual ditentukan oleh pedagang pengumpul sedangkan petani/pemilik mengikuti harga pasar yang berlaku. Meskipun di Desa Barugae memiliki pasar, tetapi masyarakat petani lebih memilih untuk memasarkan hasil panen mereka di luar Desa Barugae. Hal ini didukung oleh sistem kolektif yang digunakan dan transportasi yang lancar.

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

1. Umur Petani Responden

Faktor umur sangat besar pengaruhnya bagi aktifitas setiap individu. Seseorang yang berumur relatif muda memiliki kemampuan fisik yang lebih besar untuk melakukan aktifitas dibanding dengan orang-orang yang berumur relatif tua.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa responden yang termuda berumur 21 tahun dan yang tertua berumur 85 tahun. Menurut Sajogyo (1977) dalam Nindyastuti (2002) bahwa umur 15 – 34 tahun disebut usia produktif muda, umur 35 – 54 tahun disebut usia produktif tua dan diatas 55 tahun disebut usia non produktif. Jumlah responden petani berdasarkan klasifikasi umur dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Jumlah dan Persentase Responden Menurut Tingkat Umur di Desa Barugae Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros.

Klasifikasi Umur (Tahun)	Jumlah Responden (Orang)	Persentase (%)
15 – 34	9	30
35 – 54	13	43,3
> 55	8	26,7
Total	30	100

Tabel 7 menunjukkan bahwa petani responden umumnya berusia 15 – 34 tahun yaitu 9 orang (30%), kemudian yang berumur 35 – 54 tahun yaitu 13 orang (43,3%), dan yang berumur > 55 tahun yaitu 8 orang (26,7%) (Lampiran1).

Berdasarkan hasil tersebut maka dapat diketahui bahwa Desa Barugae memiliki jumlah petani dengan usia produktif yang lebih banyak, sehingga dengan demikian diharapkan dapat memberi nilai tambah berupa peningkatan produksi yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan dan sewa lahan petani.

2. Tingkat Pendidikan

Pendidikan pada umumnya akan mempengaruhi cara berpikir dan bertindak petani dalam usahatani. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan responden di Desa Barugae mulai dari tidak bersekolah sampai sarjana (Lampiran 1), adapun tingkat pendidikan masyarakat di Desa Barugae cukup variatif dan dapat diklasifikasikan pada Tabel 8.

Tabel 8. Jumlah dan Persentase Responden Menurut Tingkat Pendidikan Petani Hutan Kemiri Rakyat di Desa Barugae Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros

No.	Tingkat Pendidikan (Thn)	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1.	Tidak Sekolah	8	26,7
2.	SD/SR	13	43,4
3.	SMP	4	13,3
4.	SMA/STM	4	13,3
5.	Sarjana	1	3,3
	Total	30	100

Tabel 8 menunjukkan dan memperlihatkan bahwa penyebaran tingkat pendidikan petani responden mulai dari tidak bersekolah berjumlah 8 orang (26,4%), berpendidikan SD/SR berjumlah 13 (43,4%), berpendidikan SMP berjumlah 4 (13,3%), berpendidikan SMA/STM berjumlah 4 (13,3%), sedangkan yang berpendidikan sampai sarjana hanya 1 orang (3,3%). Ini jelas terlihat bahwa yang

terbanyak adalah yang berpendidikan sampai tingkat Sekolah Dasar saja sehingga dapat dikatakan bahwa di Desa Barugae tingkat pendidikannya masih tergolong rendah.

3. Jumlah Tanggungan Keluarga

Jumlah tanggungan keluarga petani dapat dijadikan motivasi untuk bekerja lebih baik, karena jumlah yang harus dinafkahi cukup banyak sehingga petani akan selalu berusaha bersungguh-sungguh untuk meningkatkan usaha taninya.

Jumlah tanggungan keluarga yang besar dapat menjadi sumber persediaan tenaga kerja keluarga. Tetapi disisi lain dapat berpengaruh terhadap tingginya biaya hidup yang harus ditanggung oleh kepala keluarga. Biaya hidup yang dimaksud antara lain: biaya kebutuhan hidup sehari-hari, konsumsi, pendidikan, sandang dan sebagainya. Tschajanocu *dalam* Loekman Soetrisno (1997) mengatakan bahwa pengaruh kebutuhan keluarga atas prestasi kerja semakin besar perbandingan antara jumlah konsumen dengan pekerja semakin besar pula pendapatan bersih, dengan kata lain petani pekerja lebih keras jika keluarga yang menjadi tanggungannya lebih besar. Untuk jelasnya mengenai jumlah tanggungan keluarga responden, dapat dilihat pada Tabel 9:

Tabel 9. Jumlah dan Persentase Tanggungan Keluarga Petani di Desa Barugae Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros.

No	Jumlah Tanggungan Keluarga	Jumlah Responden (Jiwa)	Persentase (%)
1.	≤ 4	26	86,7
2.	5 – 6	4	13,3
3.	> 6	0	
	Total	30	100

Tabel 9 menunjukkan bahwa responden yang memiliki tanggungan keluarga ≤ 4 orang sebanyak 26 jiwa (86,7%), jumlah tanggungan keluarga 5 – 6 orang sebanyak 4 jiwa (13,3%), dan jumlah tanggungan keluarga > 6 orang tidak ada. Dasar penentuan standar jumlah tanggungan keluarga ≤ 4 orang didasarkan pada Program Nasional Keluarga Berencana (KB) adanya catur keluarga dua anak cukup. Sehingga jika ditambah dengan bapak dan ibunya maka berjumlah 4 orang dalam satu keluarga (Lampiran 1).

4. Jumlah Tenaga Kerja

Besarnya tenaga kerja yang dipekerjakan pada areal kemiri akan mempengaruhi jumlah produksi yang diperoleh oleh petani dari usahatannya. Dengan bertambah besarnya tenaga kerja diharapkan intensitas kerja semakin tinggi sehingga produksi dari usahatani kemiri bertambah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan biaya tenaga kerja dilakukan berdasarkan serapan hari orang kerja (HOK) setiap pola penggunaan lahan. Harga tenaga kerja keluarga digunakan harga tenaga kerja yang berlaku dikawasan

hutan kemiri rakyat yaitu Rp. 20.000 per HOK. Untuk lebih jelasnya pengelompokkan tenaga kerja tersebut dapat dilihat pada Tabel 10 di bawah ini :

Tabel 10. Klasifikasi Jumlah Tenaga Kerja pada Usahatani HKR di Desa Barugae Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros.

No.	Klasifikasi HOK (Rp)	Jumlah (org)	Persentase (%)
1.	< 80.000	21	70
2.	80.000 – 100.000	6	20
3.	> 100.000	3	10

Dari Tabel 10 tersebut di atas menunjukkan bahwa dari 30 responden yang memiliki jumlah tenaga kerja kurang dari 3 orang atau < Rp 80.000 adalah sebanyak 21 orang dengan jumlah persentase sebesar 70%, yang memiliki tenaga kerja 4 – 5 orang atau Rp 80.000 – Rp 100.000 adalah sebanyak 6 orang dengan jumlah persentase sebesar 20% dan yang memiliki tenaga kerja lebih dari 5 adalah sebanyak 3 orang dengan jumlah persentase sebesar 10%, lebih jelasnya (Lampiran 2).

Dasar dari pengklasifikasian tenaga kerja disini adalah dari jumlah anggota keluarga yang masih bisa bekerja karena jumlah tenaga kerja yang dimaksud disini adalah tenaga kerja keluarga.



5. Luas Lahan Hutan Kemiri Rakyat

Luas lahan hutan kemiri rakyat adalah luas lahan yang dimiliki responden yang terdapat banyak tanaman kemiri pada lahan tersebut. Ini dapat dilihat pada Tabel 11 di bawah ini :

Tabel 11. Luas Lahan Hutan Kemiri Rakyat yang Dimiliki Petani Responden di Desa Barugae Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros.

No.	Luas Lahan Kemiri (Ha)	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1.	< 1	6	20
2.	1 – 3	18	60
3.	> 3	6	20
	Total	30	100

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata luas lahan kemiri rakyat yang dikelola petani di Desa Barugae adalah 2,09 ha dengan luas lahan hutan kemiri rakyat terbesar adalah 7 ha dan yang terkecil adalah 0,3 ha (Lampiran 2). Pada Tabel 11 di atas menunjukkan bahwa dari 30 orang responden terdapat 6 orang (20%) yang memiliki lahan kemiri terbesar dengan luas lahan lebih dari 3 ha, luas lahan antara 1 – 3 ha dimiliki oleh 18 responden (60%) dan luas lahan dibawah 1 ha dimiliki oleh 6 responden (20%).

6. Status Lahan dan Luas Lahan Garapan

Lahan garapan yang diolah oleh masyarakat Desa Barugae adalah lahan yang berada di luar kawasan hutan dan merupakan lahan milik yang dibebani pajak atau sudah dirinci oleh kantor pertanahan (agraria). Lahan garapan responden terdiri dari lahan kemiri, persawahan, dan lahan perkebunan. Luas lahan garapan petani merupakan potensi/modal petani dalam berusahatani. Besar kecilnya pendapatan

dan sewa lahan petani dari usahatannya terutama ditentukan oleh luas lahan garapannya karena luas lahan garapan dapat mempengaruhi produksi per satuan luas. Luas lahan garapan responden dapat dilihat pada Tabel 12.

Tabel 12. Klasifikasi Responden Berdasarkan Tingkat Kepemilikan Lahan di Desa Barugae Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros

No	Jenis Lahan Garapan	Status Lahan	Jumlah Responden (Jiwa)	Persentase (%)
1.	Kemiri	Milik	27	90
2.	Kebun Coklat	Milik	24	80

Berdasarkan Tabel 12 di atas, jenis lahan yang paling banyak dimiliki adalah kebun coklat. Kebun coklat memiliki jumlah responden sebanyak 24 jiwa (80%), kemiri memiliki responden sebanyak 27 jiwa (90%). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar dari masyarakat Desa Barugae berprofesi sebagai petani karena memiliki areal sendiri yang digarap untuk memperoleh penghasilan.

7. Biaya Penggunaan Sarana Produksi

Biaya penggunaan sarana produksi hutan kemiri rakyat adalah besarnya biaya yang digunakan oleh petani dalam memproduksi atau mengelolah lahan Usahatannya. Berikut ini dapat di lihat pada Tabel 14 di bawah ini :

Tabel 13. Biaya Penggunaan Saran Produksi yang Digunakan Petani Dalam Mengelolah Hutan Kemiri Rakyat di Desa Barugae Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros.

No.	Pola Penggunaan Lahan	Satuan	Rata-rata Biaya Produksi	Persentase (%)
1.	Kemiri	Rp	85.917	24
2.	Kebun Coklat	Rp	268.000	74,87

Dari dua pola penggunaan lahan tersebut di atas menunjukkan bahwa yang memiliki rata-rata biaya produksi tertinggi adalah dari kebun coklat yaitu sebesar Rp 268.000 dengan jumlah persentase sebesar 74,87%, dan yang memiliki rata-rata biaya produksi terendah adalah dari lahan kemiri sebesar Rp. 85.917 dengan jumlah persentase sebesar 24%, lebih jelasnya Lampiran 2 dan 3.

8. Produksi dan Produktivitas

Pengelolaan usahatani merupakan kemampuan petani menentukan, mengorganisir dan mengkoordinasikan faktor-faktor produksi yang dikuasai sebaik-baiknya dan memberikan produksi sebagaimana yang diharapkan. Ukuran keberhasilan pengelolaan usahatani tersebut adalah produksi setiap faktor maupun produktivitas dari setiap usahanya (Fadholi Hernanto, 1991).

Produksi merupakan hasil yang diperoleh dari salah satu cabang usahatani yang diusahakan. Sedangkan produktivitas merupakan perbandingan antara jumlah produksi dengan luas usahatani yang diusahakan. Berikut ini disajikan luas lahan, produksi rata-rata, produktivitas dan nilai produksi rata-rata perhektar usahatani yang dapat dilihat pada Tabel 14.

Tabel 14. Rata-rata Jumlah Luas Lahan, Produksi, Produktivitas dan Nilai Produksi dari Pola Penggunaan Lahan di Desa Barugae Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros

No	Uraian	Pola Penggunaan Lahan	
		Kemiri	Kebun Coklat
1	Luas lahan (ha)	2,09	0,84
2	Produksi Rata-rata (Kg)	374,83	411,16
3	Produktivitas (Kg/ha)	164,27	337,44
4	Nilai Produksi (Rp/ha)	2.674.433,33	3.961.025

Tabel 14 menunjukkan bahwa luas lahan yang besar adalah kemiri dengan rata-rata luas lahan 2,09 (Ha) dengan produksi rata-rata 374,83 kg dan produktivitasnya sebesar 164,27 kg/ha, nilai produksi rata-rata sebesar Rp.2.674.433,33/Ha. Sedangkan luas lahan yang paling kecil adalah kebun coklat dengan rata-rata luas sebesar 0,84 (Ha), produksi rata-rata sebesar 411,16 kg, produktivitas rata-rata adalah 337,44 kg/ha dan nilai produksi sebesar Rp.2.817.163,-/Ha. Nilai produksi kemiri kecil dibandingkan nilai produksi kebun coklat karena pemanenan kemiri dilakukan satu kali dalam setahun sedangkan pemanenannya dilakukan dua kali dalam setahun.

B. Pendapatan Bersih Petani HKR dan yang Terkonversi

Pendapatan petani adalah pendapatan yang diperoleh petani dari selisih antara penerimaan yang diperoleh petani dari usahatani dengan biaya-biaya yang dikeluarkan selama pengelolaan usahatani dalam kurun waktu satu tahun. Pendapatan petani tersebut dapat dilihat pada Tabel 15 di bawah ini :

Tabel 15. Rata-rata Pendapatan Petani dari Pola Penggunaan Lahan HKR dan yang Terkonversi dalam Setahun di Desa Barugae Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros.

No	Pola Penggunaan Lahan	Satuan	Rata-rata Pendapatan Petani
1.	HKR	Rp/Ha/Thn	Rp. 2.586.670
2.	Kebun Coklat (Terkonversi)	Rp/Ha/Thn	Rp. 3.693.025
	Selisih	Rp/Ha/Thn	Rp. 1.106.355

Dari dua pola penggunaan lahan di atas menunjukkan bahwa yang memiliki rata-rata pendapatan tertinggi adalah dari kebun coklat (terkonversi) yaitu sebanyak Rp. 3.693.025 per tahun dan yang memiliki rata-rata pendapatan terendah adalah lahan kemiri yaitu sebesar Rp. 2.586.670 per tahun. Perbedaan selisih pendapatan antara lahan HKR dan kebun coklat (terkonversi) adalah Rp. 1.106.355. Dengan demikian terdapat selisih yang cukup besar dan merupakan biaya oportunitas petani, karena tidak mengkonversi lahan hutan kemirinya.

C. Sewa Lahan HKR dan yang Terkonversi

Sewa lahan hutan kemiri rakyat adalah adalah selisih penerimaan antara total biaya termasuk biaya tenaga kerja keluarga dan biaya faktor resiko petani (keuntungan normal). Nilai sewa lahan tersebut dapat dilihat pada Tabel 16 berikut:

Tabel 16. Rata-rata Nilai Sewa Lahan Petani dari Pola Penggunaan Lahan HKR dan yang Terkonversi di Desa Barugae Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros.

No	Pola Penggunaan Lahan	Satuan	Rata-rata Nilai Sewa Lahan Petani
1.	HKR	Rp/Thn	Rp. 2.571.333
2.	Kebun Coklat (Terkonversi)	Rp/Thn	Rp. 3.639.425
	Selisih	Rp/Thn	Rp. 1.068.092

Dari dua pola penggunaan lahan di atas menunjukkan bahwa yang memiliki rata-rata nilai sewa lahan yang tertinggi adalah dari kebun coklat (terkonversi) yaitu sebanyak Rp. 3.639.425 per tahun dan lahan HKR memiliki rata-rata nilai sewa lahan terendah Rp. 2.571.333 per tahun. Perbedaan selisih sewa lahan antara lahan HKR dengan yang terkonversi adalah Rp. 1.068.092. Perbedaan selisih sewa lahan HKR dengan kebun coklat (terkonversi) menunjukkan besarnya nilai kesempatan atau keuntungan materi yang tidak dapat diperoleh oleh petani atas konsekwensyns untuk tetap mempertahankan lahan kemirinya. Berdasarkan selisih sewa lahan maka penggunaan lahan kebun coklat (terkonversi) lebih menguntungkan dibandingkan dengan usaha HKR.

D. Biaya Opportunitas Petani pada HKR

Nilai opportunity cost (biaya opporunitas petani) yang di peroleh selisih nilai sewa lahan antara HKR dengan Kebun coklat (terkonversi) yaitu Rp. 1.068.092. Berdasarkan selisih nilai, maka dapat diperkirakan betapa besarnya nilai kerugian atau besarnya nilai kesempatan yang tidak diperoleh petani untuk meraih keuntungan secara materil atas konsekuensi mereka untuk tetap mempertahankan lahan HKRnya. Menlihat besarnya nilai opportunity cost ini, hendaknya para petani diberi kesempatan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar dari usaha hutan kemirinya. Salah satu cara adalah penigkatan produktivitas lahan kemiri dan nilai jualnya di tentukan oleh pedagang pengumpul sedangkan petani/pemilik mengikuti harga pasar yang berlaku. Apabila hal ini tidak cepat diantisipasi, maka petani tidak

dapat disalahkan bila mengkonversi lahan HKR mereka ke bentuk penggunaan lahan non hutan kemiri yang memiliki nilai sewa lahan yang lebih tinggi.

Hasil ini semakin memperkuat teori Vonhunen yang dikembangkan oleh Barlow (1978) tentang teori penggunaan lahan, bahwa petani cenderung memanfaatkan lahannya untuk penggunaan yang dalam jangka pendek dapat memberikan keuntungan terbesar. Teori inilah yang dapat menjelaskan mengapa petani cenderung untuk mengkonversi lahan pertanian mereka ke penggunaan non pertanian. Ditambah lagi dengan dihadapkan pada kenyataan tersebut, pada akhirnya petani sebagian tidak lagi mengindahkan peraturan perundangan yang mengatur tentang pemanfaatan kawasan hutan.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN



A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa nilai sewa lahan hutan kemiri rakyat sebesar Rp. 2.571.333 pertahun dan kebun coklat (terkonversi) sebesar Rp. 3.639.425 pertahun. Dengan demikian besarnya nilai biaya oportunitas petani sebesar Rp. 1.068.092 pertahun.

B. SARAN

Pemerintah Daerah agar mengembangkan program peningkatan produktifitas lahan kemiri melalui pola-pola Agroforestry dan mengupayakan nilai jual kemiri untuk mengurangi laju konversi kemiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, S. 2007. *Pola Konversi dan Nilai Manfaat Hutan Kemiri Rakyat di Kabupaten Maros Sulawesi Selatan*. Disertasi tidak diterbitkan. Makassar: Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin.
- Barlow, R. 1978. *Land Resources Economic*. 3rd Edition. Prentice Hall, Inc., Engelwood Cliffs: New Jersey.
- Darusman, D. 2002. *Pembenahan Kehutanan Indonesia*. Laboratorium Politik Ekonomi dan Sosial Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan. 2005. *Data dan Informasi (Statistik) Tahun 2004*. Makassar.
- Kartodiharjo, H. 1996. *Konsep Pengembangan Hutan Rakyat Suatu Tinjauan Kelembagaan Ekonomi*. Makalah Diskusi Panel Pemanfaatan Kayu Rakyat. Departemen Kehutanan: Jakarta.
- Kuchi, C. 2004. *Kunci Tata Kelola Kehutanan Swiss : Mengembangkan Tingkat – Tingkat Pemerintahan yang Berbeda*. Makalah disajikan pada Workshop Penguatan Desentralisasi Sektor Kehutanan di Indonesia. Pusat Rencana Kehutanan Badan Planalogi Kehutanan, 26 Agustus 2004.
- Sajogyo. 1977. *Garis Kemiskinan dan Kebutuhan Minimum Pangan*. Lembaga Penelitian Sosiologi Pedesaan IPB, bogor.
- Simon, H. 1995. *Strategi Pengembangan Pengelolaan Hutan Rakyat*. Makalah disampaikan Pada Diskusi Panel Pengembangan Hutan Rakyat : Bandung, 14-20 Januari 2005.
- _____. 1998. *Kehutanan Masyarakat di Indonesia*. Warta FKKM. No. I Tahun I. Yogyakarta.
- Suparmoko. 1989. *Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan*. Cetakan Pertama. BPFE, Yogyakarta.
- _____. 2000. *Ekonomi Lingkungan*. Edisi Pertama. BPFE, Yogyakarta.
- Supriadi, D. 2002. *Pengembangan Hutan Rakyat di Indonesia*. Jurnal Hutan Rakyat 1 : 23-33.

- Soetrisno, L. 1997. *Menuju Masyarakat partisipatif*. Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- Tinambuan, Djaban, dkk. 1995. *Program Pengembangan Usaha Hutan Rakyat Suatu Tinjauan Sosial Ekonomi dan Kelembagaan*. Makalah Pembahasan pada Lokakarya Pengembangan Hutan Rakyat di Bandung. Direktorat Jenderal Republik Indonesia Departemen Kehutanan, Jakarta.
- Wirakusumah, S. 2003. *Mendambakan Kelestarian Sumberdaya Hutan bagi Sebesar – Besarnya Kemakmuran rakyat*. Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Yusran. 2005. *Analisis Performansi dan Pengembangan Hutan Kemiri Rakyat di Kawasan Pengunungan Bulusaraung Sulawesi Selatan*. Disertasi tidak diterbitkan. Bogor: Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
- Zain, Alam Setia. 1998. *Aspek Pembinaan Kawasan Hutan dan Stratifikasi Hutan Rakyat*. PT.Rineka Cipta, Jakarta.